



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

**Menko Polhukam,**

**MOH. MAHFUD MD**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Tahun Anggaran : 2022

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	77
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Jumlah Anggaran: Rp.268.261.144.000,-  
(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2022  
**Menko Polhukam,**

  
**MOH. MAHFUD MD**

**DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA  
MENKO POLHUKAM**

Sasaran Strategis	Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Definisi Sasaran Strategis	Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik sebagai tujuan akhir
Indikator Kinerja	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Definisi	<p>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional adalah persentase capaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja sesuai dokumen perencanaan nasional yang akan dikoordinasikan, disinkronisasikan serta dilakukan pengendalian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Demokrasi Indonesia Capaian kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Unit analisis IDI adalah provinsi. Capaian IDI nasional merupakan agregasi dari capaian provinsi. Selain capaian nasional, IDI menghasilkan nilai indeks untuk setiap provinsi, setiap aspek, setiap variabel, dan setiap indikator. Secara keseluruhan hasil IDI merupakan suatu sketsa tentang kondisi demokrasi di Indonesia yang cukup komprehensif. Aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI</li> </ol>

adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0-100. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut:  $60 <$  Buruk; 60-80 Sedang;  $>80$  Baik.

2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional  
Citra Indonesia di mata dunia internasional adalah persepsi yang dipercayai/diyakini *stakeholder* eksternal terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan Internasional. Pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan *power* yang dimiliki baik yang bersifat *hard* maupun *soft*. Citra dalam hal ini dapat bersifat positif dan negatif.

3. Indeks Perilaku Anti Korupsi

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah metode pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi melalui survei perilaku anti korupsi yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 (kecuali tahun 2016).

4. Terpenuhinya Kekuatan Pokok *Minimum Essential Force* (MEF)

Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

5. Tingkat Kriminalitas

Tingkat kriminalitas merupakan indikator yang dapat merepresentasikan tingkat keamanan di Indonesia yang diukur melalui kuantitas kelompok atau komunitas yang melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana sehingga mempengaruhi keseimbangan masyarakat.

	<p>6. Skor <i>Global Cybersecurity Index</i></p> <p><i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota <i>International Telecommunication Union</i> (ITU) terhadap peningkatan kesadaran <i>cybersecurity</i>. GCI membahas seputar <i>Global Cybersecurity Agenda</i> dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Legal</i> (hukum)</li> <li><i>Technical</i> (teknis)</li> <li><i>Organizational</i> (organisasi)</li> <li><i>Capacity Building</i> (pengembangan kapasitas)</li> <li><i>Cooperation</i> (kerja sama)</li> </ol> <p>7. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas</p> <p>Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (<i>business process</i>) dan sumber daya manusia aparatur.</p>
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Pusat Statistik (BPS)</li> <li>Kementerian Luar Negeri</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)</li> <li>Kementerian Pertahanan</li> <li>Polri</li> <li><i>International Telecommunication Union</i> (ITU)</li> <li>Kementerian PAN RB</li> </ol>
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik}}{\text{Target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Sasaran Strategis	Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik
Indikator Kinerja 1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Definisi	Penilaian Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan yang menjadi penilaian dalam Reformasi Birokrasi yaitu area manajemen perubahan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan peraturan perundang-undangan, area penataan sumber daya manusia, area penataan tata laksana, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas kinerja, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	Kemenpan RB
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi Tim Penilai Kemenpan RB
Indikator Kinerja 2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam (SAKIP)
Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Komponen dalam penilaian evaluasi SAKIP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> <li>4. Evaluasi Internal</li> <li>5. Capaian Kinerja</li> </ol>
Sumber Data	Kemenpan RB
Cara Menghitung	<p>Penilaian berasal dari Tim Penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenpan RB dengan kategori penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (&gt;90-100)</li> <li>2. A (&gt;80-90)</li> <li>3. BB (&gt;70-80)</li> <li>4. B (&gt;60-70)</li> <li>5. CC (&gt;50-60)</li> </ol>

	6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam
Definisi	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Empat opini BPK, yaitu: WTP, WDP, <i>adverse</i> , dan <i>disclaimer</i> .
Sumber Data	Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Penilaian yang berasal dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

**MENKO POLHUKAM**



**MOH. MAHFUD MD**